

**RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2017**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 32 D Temanggung
Telepon 0293 - 492089 email : datasatpol@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan KaruniaNya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung telah dapat menyelesaikan penyusunan/perencanaan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017, yang merupakan bentuk perencanaan program dan kegiatan selama jangka waktu 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung tahun 2017 adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.

Demikian Renja Kerja tahun 2017 ini kami susun semoga dapat menjadikan acuan dan sebagai peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.

Temanggung, 1 Juni 2016
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. Satria Endra Basuki, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19611110 198503 1 018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun 2015	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun 2015 dan Capaian Renstra Satpol PP	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP	17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP	28
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5. Penelaahan Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat	35
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017	37
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP	37
3.2. Program dan Kegiatan	37
Bab IV Penutup	40

LAMPIRAN

Matrik Program dan Kegiatan Tahun 2017

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi dan Tata Laksana Satpol PP	18
------------	---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Pencapaian Renstra Satpol PP Kabupaten Temanggung s.d Tahun 2016	9
Tabel 2.2	Kondisi Sumber Daya Manusia Satpol PP Kabupaten Temanggung Tahun 2016	18
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Program dan Target Kinerja Program Satuan Polisi Praja Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018	21
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung	23
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung	29
Tabel 2.6	Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung Tahun 2017	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan SPPD berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan SKPD, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan SKPD untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja SKPD juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD oleh SKPD. Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja SKPD disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di SKPD berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab SKPD.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Renja Satpol PP) Kabupaten Temanggung Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2017 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2017.

Renja Satpol PP Kabupaten Temanggung disusun dengan tahapan dan serangkaian kegiatan penyusunan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Satpol PP diperlukan dalam rangka menganalisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Satpol PP, yang menyangkut aspek:

- a. Kondisi pelayanan Satpol PP;
- b. Organisasi dan Tatalaksana Satpol PP;
- c. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP tahun sebelumnya;
- d. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Satpol PP;
- e. Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- f. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Satpol PP;
- g. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Satpol PP;
- h. Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- i. Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2016;
- j. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pusat;
- k. Informasi lain terkait pelayanan Satpol PP.

2. Analisis gambaran pelayanan Satpol PP;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Satpol PP adalah:

- a. Menentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Satpol PP sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi.
- b. Mengidentifikasi tolok ukur/besaran indikator kinerja menurut analisis kebutuhan, pada setiap jenis indikator;
- c. Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Satpol PP untuk kondisi tahun lalu, tahun berjalan, tahun rencana, dan prakiraan maju tahun berikutnya;
- d. Menghitung realisasi capaian target kinerja untuk kondisi tahun lalu, dan perkiraan realisasi tahun berjalan berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun berjalan;
- e. Menghitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan Satpol PP;

3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP tahun lalu berdasarkan Renstra Satpol PP;

Review hasil evaluasi mencakup:

- a. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- b. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- c. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan tersebut;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Satpol PP dan kinerja pelayanan Satpol PP;
- f. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian prioritas dan target program Renstra Satpol PP dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- b. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Satpol PP tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Satpol PP;
- c. Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program Renstra Satpol PP dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- d. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Satpol PP sampai dengan tahun berjalan, misalnya program apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP

tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Satpol PP.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Satpol PP dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Satpol PP.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Satpol PP.
- c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals).
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satpol PP.
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Satpol PP.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

6. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Satpol PP.

7. Perumusan kegiatan prioritas;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk

memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP dalam pembangunan daerah.

8. Penyajian awal dokumen Renja Satpol PP;

Penyusunan dokumen Renja Satpol PP merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

Renja Satpol PP tersebut merupakan bahan pembahasan untuk disinergikan dengan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan yang dibahas dalam forum SKPD kabupaten.

9. Penyempurnaan Renja Satpol PP;

Penyempurnaan Renja Satpol PP perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari usulan masyarakat melalui musrenbang RKPD Kabupaten.

10. Pembahasan forum SKPD; dan

Pembahasan dalam forum SKPD kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan Renja Satpol PP dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di Kecamatan.

11. Penyesuaian dokumen Renja Satpol PP dengan hasil pembahasan forum SKPD.

Dokumen Renja Satpol PP yang telah didiskusikan dalam forum SKPD, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan Renja Satpol PP Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
31. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
32. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005–2025;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-203;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Satpol PP Tahun 2017 adalah sebagai pedoman bagi Satpol PP Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan program dan kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Satpol PP untuk Tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Satpol PP Tahun 2017 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2017 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP selama kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2017;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Satpol PP tahun 2017;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Satpol PP tahun 2017;
5. Sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Satpol PP tahun 2017.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Satpol PP Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP TAHUN 2015
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN SATPOL PP TAHUN 2017
- BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP
TAHUN 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun 2015 dan Capaian Renstra Satpol PP

Dalam melakukan penyusunan Renja Satpol PP Tahun 2017, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Satpol PP untuk 3 (tiga) tahun sebelumnya yaitu, evaluasi terhadap capaian Renja di Tahun 2014 dan 2015 serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan, yaitu Tahun 2016.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Satpol PP sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2016 terhadap target di Tahun 2018 yang merupakan tahun terakhir periode Renstra Satpol PP Tahun 2014-2018.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Satpol PP di tahun 2015 maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Pencapaian Renstra Satpol PP Kabupaten Temanggung s.d. Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2016			Keterangan Capaian terhadap target akhir Renstra
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan Tahun 2016	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d tahun 2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Perencanaan Pembangunan Daerah											
Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	Terlaksananya penyusunan dan pelaporan SKPD	Dokumen	4	-	4	4	100	4	4	100	≠

Program Pemeliharaan Kantramibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal												
Penertiban pedagang kaki lima	Terlaksananya penertiban pedagang kaki lima	Lokasi	7	5	6	6	100	6	6	100	≠	
Penegakan perda dan yustisi	Terlaksananya penegakan perda dan yustisi	Persen	75	91.02	65	95,24	146,52	70	70	100	√	
Penertiban pertambangan mineral dan batubara	Terlaksananya penertiban pertambangan mineral dan batubara	Lokasi	6	3	4	4	100	-	-	-	≠	
Pembersihan atribut dan alat peraga Pilkada	Terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat	Lokasi	6	-	-	-	-	-	-	-	0	
Pembersihan spanduk dan reklame	Terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat	Lokasi	6	6	-	-	-	-	-	-	≠	
Penertiban Pelajar	Terlaksananya penertiban pelajar	Lokasi	7	5	5	5	100	6	6	100	≠	
Patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Terlaksananya patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kali tiap kecamatan	1	1	1	1	100	1	1	100	≠	
Koordinasi Keamanan Daerah	Terlaksananya patroli terpadu koordinasi keamanan daerah	Lokasi	16	8	10	10	100	12	12	100	≠	
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Terselenggaranya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Rakor	1	1	1	1	100	1	1	100	≠	
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan												
Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pelaksanaan upacara kenegaraan yang khidmat	Pentas	7	7	7	6	85,71	7	7	100	≠	

Pengadaan Pakaian Dinas Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung	Tersedianya pakaian Korps Musik	Stel	54	-	-	-	-	54	54	100	-
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan											
Pembinaan satuan linmas	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten	Orang tiap RT	1	1	1	1.53	153	1	1.53	153	√
Pengadaan Pakaian Linmas Desa/Kelurahan	Tercukupinya pakaian Linmas desa/Kelurahan	Orang	550	386	-	-	-	85	85	100	0
Diklat SAR Anggota Linmas	Terselenggaranya Diklat SAR anggota Linmas	Orang	800	-	200	85	42,50	200	200	100	0
PAM PILKADA	Terlaksananya Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah	Kecamatan	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Terlaksananya Pengamanan dan Ketertiban Di Wilayah Kabupaten Temanggung	Kecamatan	20	20	-	-	-	-	-	-	≠
Pengamanan Pilkades	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Temanggung yang Kondusif	Desa	21	-	-	-	-	35	35	100	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telekomunikasi	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	100	≠
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai dan memadai	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	100	≠
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	100	≠
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	100	≠

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang memadai	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	100	≠
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi kantor	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	100	≠
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	100	≠
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	100	≠
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	100	≠
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	100	≠
Jasa pelayanan perkantoran	Terpenuhiya kesejahteraan pegawai	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	100	≠
Tambahan penghasilan khusus Satpol PP	Tercukupinya tambahan penghasilan resiko kerja	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Premi Asuransi Satpol PP	Tercukupinya asuransi Satpol PP	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur											
Pengadaan peralatan gedung kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Jenis Barang	23	4	4	6	150	5	5	100	≠
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Unit gedung	1	1	1	1	100	1	1	100	≠
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	100	≠
Pengadaan peralatan Pengamanan dan Pengawasan	Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelaksanaan	Paket	20	20	-	-	-	-	-	-	≠

	pengamanan dan pengawalan											
Pengadaan peralatan / kelengkapan Jambore Satpol PP	Meningkatnya kinerja aparatur	Paket	1	1	-	-	-	-	-	-	-	≠
Program Peningkatan disiplin aparatur												
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya disiplin aparatur	Orang	526	134	50	45	90	134	134	100	0	
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah												
Pengamanan dan Pengawalan	Terselenggaranya pengamanan dan pengawalan protokol	Lokasi	20	20	20	20	100	20	20	100		≠
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur												
Pembinaan dan pengembangan Satpol PP	Meningkatnya disiplin dan kualitas Satpol PP	Orang	45	45	45	44	97,78	45	39	100	0	
Pendidikan dan pelatihan Satpol PP	Meningkatnya disiplin dan kualitas Satpol PP	Orang	5	1	1	0	0	1	1	100	0	
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan												
Pemberantasan barang kena cukai ilegal (DBHCHT)	Terlaksananya pemberantasan barang kena cukai ilegal	Lokasi	20	14	15	15	100	16	16	100		≠

Sumber : Satpol PP Kab. Temanggung Tahun 2016.

Keterangan : 0 : target belum tercapai, ≠ : target telah tercapai, dan √ : melebihi target

Dari Tabel 2.1. maka dapat diketahui bahwa sampai dengan Tahun 2016 belum semua kegiatan dapat mencapai target yang tercantum pada Renstra Satpol PP Tahun 2014-2018. Secara lebih rinci maka kegiatan tersebut dapat dikategorikan lebih lanjut dalam beberapa klasifikasi sebagai berikut:

1. Capaian kegiatan yang telah memenuhi target (100 %)
 - 1) Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan

- 2) Kegiatan Penertiban Pedagang Kaki Lima
 - 3) Kegiatan Penertiban Pertambangan Mineral dan Batubara
 - 4) Kegiatan Penertiban Pelajar
 - 5) Kegiatan Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - 6) Kegiatan Koordinasi Keamanan Daerah
 - 7) Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
 - 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 9) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 10) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 11) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 12) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 13) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 14) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 15) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 16) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - 17) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
 - 18) Kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran
 - 19) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - 20) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - 21) Kegiatan Pengamanan dan Pengawasan
 - 22) Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)
2. Capaian kegiatan yang melebihi target (diatas 100 %)
- 1) Kegiatan Penegakan Perda dan Yustisi
 - 2) Kegiatan Pembinaan Satuan Linmas
 - 3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3. Capaian kegiatan yang tidak memenuhi target (dibawah 100 %)

1) Kegiatan Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung

Target kinerja untuk kegiatan ini adalah pentas Korsik untuk mengiringi upacara di tingkat kabupaten, dengan capaian 6 kali pentas dari 7 kali pentas yang ditargetkan. Tidak tercapainya target untuk kegiatan ini adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya :

- Setiap upacara yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten Temanggung, ada kalanya tidak menggunakan Korps Musik Praja Sangkakala atau menggunakan Korps Musik milik Kodim 0706

Dengan tidak tercapainya target kinerja pada tahun 2015 tersebut, maka akan berimplikasi dengan tidak tercapainya target akhir yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Satpol PP

Untuk mengatasi faktor penyebab tersebut kedepan perlu dilakukan koordinasi yang lebih aktif terhadap instansi yang menyelenggarakan upacara di tingkat Kabupaten.

2) Kegiatan Diklat SAR Anggota Linmas

Dalam dokumen Renja tahun 2015 kegiatan ini ditargetkan untuk dapat melakukan pendidikan terhadap anggota Linmas sejumlah 200 orang. Akan tetapi capaiannya hanya 85 orang. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena anggaran yang disediakan dalam APBD hanya cukup untuk melakukan pendidikan terhadap 85 orang anggota Linmas.

Dengan tidak tercapainya target kinerja pada tahun 2015 tersebut, maka akan berimplikasi dengan tidak tercapainya target akhir yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Satpol PP.

Untuk mengatasi faktor penyebab tersebut kebijakan yang dilakukan adalah dengan menyesuaikan jumlah anggota Linmas yang mengikuti pendidikan dengan anggaran yang ada.

3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan, bahwa target kinerja tahun 2015 untuk Kegiatan

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya adalah 50 orang. Adapun capaiannya adalah 45 orang. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena adanya mutasi pegawai di lingkungan Kabupaten Temanggung sehingga ada beberapa personil Satpol PP yang pindah ke SKPD lain, juga adanya pegawai yang pensiun yang secara otomatis mengurangi capaian kegiatan.

Dengan tidak tercapainya target kinerja pada tahun 2015 tersebut, maka akan berimplikasi dengan tidak tercapainya target akhir yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Satpol PP.

Kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi faktor tersebut adalah dengan menambah jenis barang pada kegiatan tersebut.

4) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Satpol PP

Capaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Satpol PP adalah 44 orang dari target 45 orang. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan adanya pegawai yang pensiun pada tahun tersebut.

Dengan tidak tercapainya target kinerja pada tahun 2015 tersebut, maka akan berimplikasi dengan tidak tercapainya target akhir yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Satpol PP.

Kebijakan yang dilakukan terhadap tidak tercapainya kegiatan ini adalah dengan mengoptimalkan anggaran yang ada untuk melakukan pembinaan terhadap personil yang ada.

5) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Satpol PP

Kegiatan ini ditargetkan untuk memberangkatkan 1 orang personil mengikuti Pendidikan dan pelatihan PPNS. Karena dari personil yang ada belum ada yang memenuhi kualifikasi untuk diberangkatkan, maka target untuk kegiatan tidak dapat dicapai. Belum adanya personil yang memenuhi kualifikasi merupakan faktor tidak tercapainya target kinerja untuk kegiatan ini.

Dengan tidak tercapainya target kinerja pada tahun 2015 tersebut, maka akan berimplikasi dengan tidak tercapainya target akhir yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Satpol PP.

Kebijakan yang dilakukan terhadap tidak tercapainya kegiatan ini adalah dengan mengoptimalkan anggaran

yang ada untuk memberangkatkan kegiatan pembinaan teknis yang lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

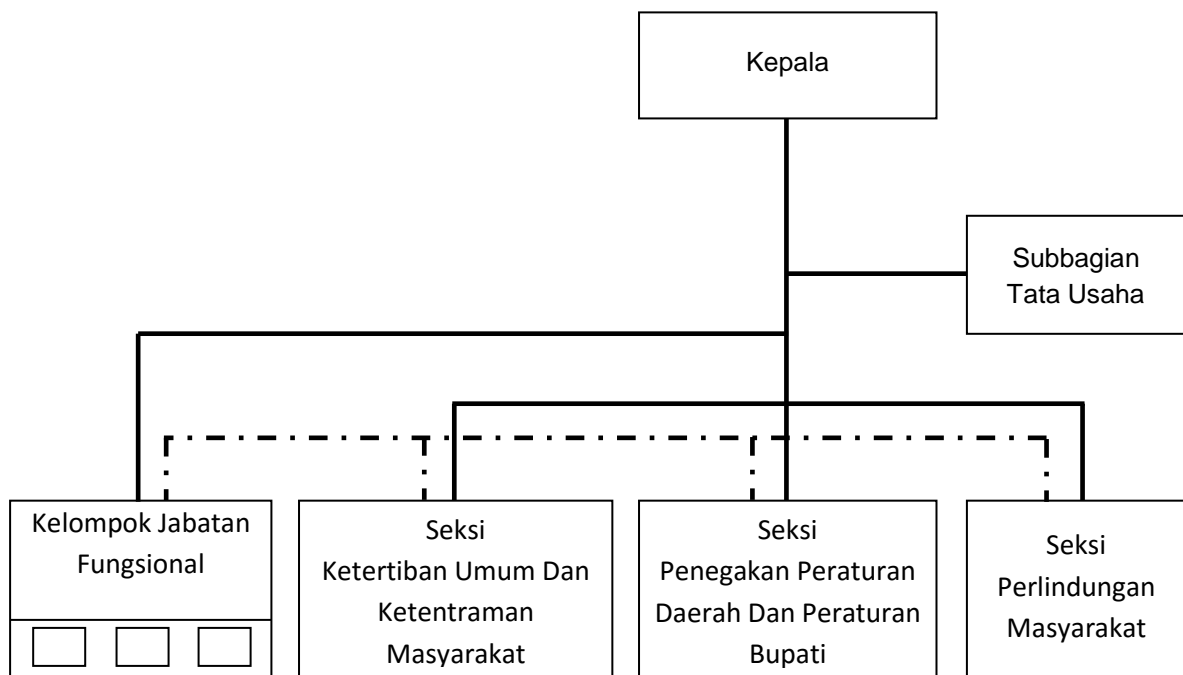
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satpol PP mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
3. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
4. penyusunan dan pelaksanaan program dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat;
5. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. perumusan, penyiapan, pembinaan dan peningkatan SDM Satpol PP dan Penyidik PNS;
7. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Satpol PP;
8. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
9. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Satpol PP Kabupaten Temanggung terdiri dari :

1. Kepala;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat;
4. Seksi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati;
5. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
6. Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Satpol PP sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi dan Tata Laksana Satpol PP

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Satpol PP maka dibutuhkan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja yang memadai. Kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Satpol PP dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.2
Kondisi Sumber Daya Manusia
Satpol PP Kabupaten Temanggung Tahun 2016

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	%
	Kondisi pegawai berdasarkan:		
1	Kualisasi Pendidikan		
	a SD	1	2.56
	b SMP	1	2.56
	c SMA	33	84.62

	d Sarjana Muda (D-III)	-	-
	e S-1 dan D-IV	2	5.13
	f S-2	2	5.13
	Jumlah	39	100
2	Pangkat/Golongan Ruang		
	a PTT	-	-
	b Gol I	-	-
	c Gol II	31	79.49
	d Gol III	7	17.95
	e Gol IV	1	2.56
	Jumlah	39	100
3	Jabatan		
	a Eselon III	1	2.56
	b Eselon IV	4	10.26
	c Jabatan Fungsional Umum	34	87.18
	Jumlah	39	100
	JUMLAH	39	

Sumber : Satpol PP Kabupaten Temanggung Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa Satpol PP belum didukung dengan sumber daya manusia yang mencukupi. Dengan kondisi wilayah Kabupaten Temanggung yang cukup luas, personil Polisi Pamong Praja yang berada di kantor Satpol PP hanya berjumlah 39 orang. Hal tersebut dapat berdampak terhadap kinerja Satpol PP dalam upaya pencapaian target kinerja. Perlu diketahui, jumlah tersebut terdiri dari : 33 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Juga, jumlah tersebut termasuk pejabat struktural dan staf yang menangani pendadministrasian Kantor Satpol PP, sehingga untuk jumlah pasukan yang benar-benar untuk melaksanakan tugas di lapangan kurang dari 1 pleton (30 orang).

Adapun dukungan sarana dan prasarana yang ada di Satpol PP dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kendaraan roda 4 (empat), terdiri dari :
 - a. 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza tahun 2014 sebagai mobil operasional Kepala Satpol PP;
 - b. 1 (satu) buah mobil Toyota Hilux tahun 2012 sebagai mobil operasional Pengawasan;
 - c. 1 (satu) buah Truck (Toyota New Dyna) Tahun 2008; dan
 - d. 1 (satu) buah Mobil Patroli Toyota Kijang Tahun 2001.
2. Kendaraan roda 2 (dua), terdiri dari :
 1. 1 (satu) buah Honda supra X 125 sebagai kendaraan operasional Kasubbag Tata Usaha;

2. 1 (satu) buah Honda supra X 125 sebagai kendaraan operasional Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
3. 1 (satu) buah Honda Win 100 untuk sebagai kendaraan operasional Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
4. 1 (satu) buah Honda Win 100 sebagai kendaraan operasional Kasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
5. 1 (satu) buah Honda Win 100 sebagai kendaraan operasional Kasi Perlindungan Masyarakat;
6. 1 (satu) buah Honda Supra Fit untuk operasional kegiatan Perlindungan Masyarakat; dan
7. 1 (satu) buah Honda win 100 untuk operasional kegiatan Satpol PP.

3. Komputer

Pada kantor Satpol PP sarana prasarana penunjang pengadministrasian berupa komputer sejumlah 7 (tujuh) unit, 5 (lima) unit Laptop, 7 (tujuh) buah printer, dan 2 (dua) buah mesin ketik. Dari ke ketujuh unit tersebut ada dua komputer yang kondisinya tidak layak pakai dikarenakan komputer tersebut masih berupa komputer pentium IV versi lama dan komputer pentium II yang sudah sangat sulit untuk diterapkan program-program penunjang pengadministrasian dan bahkan seringkali rusak. Adapun untuk mesin pencetak (printer) semuanya dapat digunakan untuk men unjang pengadministrasian kantor, sedangkan untuk mesin ketik, hanya 1 (satu) buah yang dapat digunakan secara optimal.

4. Gedung Kantor

Mulai Tahun 2012 gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung menempati Gedung Korpri yang berada di Jalan A. Yani No. 32 D satu kompleks dengan gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Temanggung, dan sampai dengan saat ini Satpol PP Kabupaten Temanggung belum mempunyai gedung kantor sendiri. Untuk diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir, Satpol PP sudah mengalami 4 (lima) kali perpindahan gedung, sehingga hal tersebut cukup mengganggu kinerja Satpol PP. Untuk ini sangat perlu sekali Satpol PP mempunyai gedung kantor yang sekiranya tidak mengalami perpindahan lagi, juga gedung yang dilengkapi dengan gudang sebagai tempat arsip, peralatan korsik, dan barang-barang hasil penertiban.

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tersebut diatas dirasakan masih kurang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, terutama dalam hal ketersediaan kendaraan operasional.

Ketersediaan sumber daya manusia yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang merupakan salah satu kunci pokok bagi pencapaian target kinerja Satpol PP baik yang tertuang dalam Renstra Satpol PP Tahun 2014-2018 maupun didalam Renja Satpol PP Tahun 2017. Sehingga penambahan SDM dalam hal kualifikasi yang memiliki sertifikat PPNS dan ketersediaan armada kendaraan yang memadai perlu adanya penambahan.

Indikator kinerja Satpol PP pada periode Renstra 2014-2018 adalah sesuai dengan apa yang menjadi Indikator Kinerja Daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018. Adapun Indikator Kinerja Program Satpol PP beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Program dan Target Kinerja Program
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan Target	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2018
			2014	2016	2017	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100	100
2	Angka Kriminalitas	angka	0,5	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46
3	Cakupan Penanganan demonstrasi	%	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	kali	1	1	1	2	3	3
5	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas)	Rasio	1,59	1,60	1,60	1,62	1,62	1,62

Sumber : RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

Adapaun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah

Rumus untuk indikator ini adalah jumlah pelanggaran perda dan atau peraturan kepala daerah yang ditangani di

tahun bersangkutan di bagi jumlah pelanggaran perda dan atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan atau dipantau di tahun bersangkutan kali 100. Untuk penanganan oleh Satpol PP masih dalam tahap non yustisial, karena belum adanya PPNS yang berada di Satpol PP jika akan dilanjutkan ke tahapan Pro Yustisial.

2. Angka Kriminalitas

Rumus untuk indikator ini adalah Jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000. Dalam pencarian data, Satpol PP berkoordinasi dengan Polres Temanggung.

3. Cakupan Penanganan demonstrasi

Jumlah penanganan demo dibagi jumlah demo yang terjadi x 100%. Dalam pelaksanaan pengamanan demo berkoordinasi dengan instansi keamanan terkait.

4. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Banyaknya patroli dalam satu tahun dibagi banyaknya jumlah kecamatan

5. Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas)

Jumlah Anggota linmas yang ada dibagi jumlah rukun tetangga (RT)

Indikator kinerja Program Satpol PP yang menggambarkan pelayanan Satpol PP sebagaimana tersebut pada tabel diatas selanjutnya diterjemahkan lebih lanjut ke dalam kinerja pelayanan Satpol PP sesuai dengan target yang dituangkan dalam Renstra Satpol PP Tahun 2014-2018. Adapun indikator pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung Tahun 2015

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Daerah (Indikator Program) dan Indikator Kegiatan	SPM (Standar Nasional)	IKK	Satuan Target	Target Kinerja				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah													
1	Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	Terlaksananya penyusunan dan pelaporan dokumen SKPD			Dokumen	-	4	4	4	-	4	4	4	
B.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal													
1	Penertiban pedagang kaki lima	Terlaksananya penertiban pedagang kaki lima			Kecamatan	5	6	6	7	5	6	6	7	
2	Penegakan perda dan yustisi	Terlaksananya penegakan perda dan yustisi			Persen	65	65	70	70	91.02	-	70	70	
3	Penertiban pertambangan mineral dan batubara	Terlaksananya penertiban pertambangan mineral dan batubara			Lokasi	3	4	5	5	3	4	-	5	
4	Pembersihan atribut dan alat peraga Pilkada	Terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat			Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Pembersihan spanduk dan reklame	Terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat			Lokasi	6	-	-	-	6	-	-	-	
6	Penertiban Pelajar	Terlaksananya penertiban pelajar			Lokasi	5	5	6	6	5	5	6	6	
7	Patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Terlaksananya patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat			Kali tiap kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1	

	8	Koordinasi Keamanan Daerah	Terlaksananya patroli terpadu koordinasi keamanan daerah			Kecamatan	8	10	12	14	8	10	12	14	
	9	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Terselenggaranya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Rakor	1	1	1	1	1	1	1	1	
C.		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan													
	1	Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pelaksanaan upacara kenegaraan yang khidmat			Pentas	7	7	7	7	7	6	7	7	
	2	Pengadaan Pakaian Dinas Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung	Tersedianya pakaian Korps Musik			Stel	-	-	54	-	-	-	54	-	
D.		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan													
	1	Pembinaan satuan linmas	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten			Orang tiap RT	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	Pengadaan Pakaian Linmas Desa/Kelurahan	Tercukupinya pakaian Linmas desa/Kelurahan			Orang	200	350	-	-	-	-	86	-	
	3	Diklat SAR Anggota Linmas	Terselenggaranya Diklat SAR anggota Linmas			Orang	-	200	200	200	-	85	200	200	
	4	PAM PILKADA	Terlaksananya Pengamanan Pemilu Kepala Dearah			Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5	Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Terlaksananya Pengamanan dan Ketertiban Di Wilayah Kabupaten Temanggung			Kecamatan	20	-	-	-	20	-	-	-	
	6	Pengamanan Pilkades	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Temanggung			Desa	-	-	35	-	-	-	35	-	

		yang Kondusif												
E.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telekomunikasi			Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai dan memadai			Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor			Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
4	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor			Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang memadai			Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi kantor			Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
8	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman			Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah			Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
11	Jasa pelayanan perkantoran	Terpenuhinya kesejahteraan pegawai			Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
12	Tambahan penghasilan khusus Satpol PP	Tercukupinya tambahan penghasilan resiko kerja			Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	

	13	Premi Asuransi Satpol PP	Tercukupinya asuransi Satpol PP		Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	
F.		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur												
	1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran		Jenis Barang	4	4	5	5	6	6	5	5	
	2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor		Unit gedung	1	1	1	1	1	1	1	1	
	3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor		Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
	4	Pengadaan peralatan Pengamanan dan Pengawasan	Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelaksanaan pengamanan dan pengawasan		Paket	20	-	-	-	20	-	-	-	
	5	Pengadaan peralatan/kelengkapan Jambore Satpol PP	Meningkatnya kinerja aparatur		Paket	1	-	-	-	1	-	-	-	
G.		Program Peningkatan disiplin aparatur												
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya disiplin aparatur		Orang	158	50	134	50	134	45	134	50	
H.		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah												
	1	Pengamanan dan Pengawasan	Terselenggaranya pengamanan dan pengawasan protololer		Kecamatan	20	20	20	20	20	20	20	20	
I.		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur												
	1	Pembinaan dan pengembangan Satpol PP	Meningkatnya disiplin dan kualitas Satpol PP		Orang	46	45	45	45	46	44	39	45	

	2	Pendidikan dan pelatihan Satpol PP	Meningkatnya disiplin dan kualitas Satpol PP			Orang	1	1	1	1	1	-	1	1	
J.		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan													
	1	Pemberantasan barang kena cukai ilegal (DBHCHT)	Terlaksananya pemberantasan barang kena cukai ilegal			Lokasi	14	15	16	18	14	15	16	18	

Sumber : Renstra Satpol PP Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP sebagaimana berikut:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Satpol PP dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Satpol PP
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP
3. Capaian kinerja pelayanan Satpol PP berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Bupati sekaligus berpengaruh dalam pencapaian SPM dan MDGS
4. Selain permasalahan dan hambatan yang dihadapi, terdapat juga tantangan dan peluang yang harus diupayakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Satpol PP
5. Catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan di tahun 2017.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung

No	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan Target	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan Target	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	BELANJA LANGSUNG						BELANJA LANGSUNG						
A.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						Program Perencanaan Pembangunan Daerah						
1	Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya penyusunan dan pelaporan dokumen SKPD	Dokumen	4	1.250.000	Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya penyusunan dan pelaporan dokumen SKPD	Dokumen	4	1.500.000	
B.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal						Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal						
1	Penertiban pedagang kaki lima	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya penertiban pedagang kaki lima	Kecamatan	7	90.000.000	Penertiban pedagang kaki lima	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya penertiban pedagang kaki lima	Kecamatan	7	40.000.000	
2	Penegakan perda dan yustisi	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya penegakan perda dan yustisi	Persen	70	90.000.000	Penegakan perda dan yustisi	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya penegakan perda dan yustisi	Persen	70	56.000.000	
3	Penertiban pertambangan mineral dan batubara	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya penertiban pertambangan mineral dan batubara	Lokasi	5	37.500.000	Penertiban pertambangan mineral dan batubara	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya penertiban pertambangan mineral dan batubara	Lokasi	5	37.500.000	

	4	Penertiban Pelajar	Kabupaten Temanggung	Terlaksanya penertiban pelajar	Lokasi	6	37.500.000	Penertiban Pelajar	Kabupaten Temanggung	Terlaksanya penertiban pelajar	Lokasi	6	25.000.000
	5	Patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kali tiap kecamatan	1	45.000.000	Patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kali tiap kecamatan	1	60.000.000
	6	Koordinasi Keamanan Daerah	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya patroli terpadu koordinasi keamanan daerah	Kecamatan	7	42.500.000	Koordinasi Keamanan Daerah	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya patroli terpadu koordinasi keamanan daerah	Kecamatan	7	42.500.000
	7	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Kabupaten Temanggung	Terselenggaranya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Rakor	1	17.500.000	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Kabupaten Temanggung	Terselenggaranya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Rakor	1	17.500.000
	8							Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Orang	100	125.000.000
C.		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan						Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan					
	1	Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pelaksanaan upacara kenegaraan yang khidmat	Pentas	7	95.000.000	Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pelaksanaan upacara kenegaraan yang khidmat	Pentas	7	77.500.000
	2							Pengadaan Alat Korps Musik	Kabupaten Temanggung	Tersedianya peralatan Korps Musik yang sesuai standar	Paket	1	240.000.000
D.		Program pemberdayaan masyarakat untuk						Program pemberdayaan masyarakat untuk					

	menjaga ketertiban dan keamanan						menjaga ketertiban dan keamanan						
	1 Pembinaan satuan linmas	Kabupaten Temanggung	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten	Orang tiap RT	1	140.000.000	Pembinaan satuan linmas	Kabupaten Temanggung	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten	Orang tiap RT	1	112.000.000	
	2 Diklat SAR Anggota Linmas	Kabupaten Temanggung	Terselenggaranya Diklat SAR anggota Linmas	Orang	200	100.000.000	Diklat SAR Anggota Linmas	Kabupaten Temanggung	Terselenggaranya Diklat SAR anggota Linmas	Orang	200	80.000.000	
	3						Pembinaan dan Pelantikan Anggota Satlinmas Se Kabupaten temanggung	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pembinaan dan pelantikan anggota Satlinmas se Kabupaten Temanggung	Orang	100	80.000.000	
E.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Temanggung	Tersedianya jasa telekomunikasi	Bulan	12	6.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Temanggung	Tersedianya jasa telekomunikasi	Bulan	12	4.800.000	
	2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Temanggung	Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai dan memadai	Bulan	12	115.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Temanggung	Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai dan memadai	Bulan	12	92.000.000	
	3 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya kebersihan kantor	Bulan	12	3.500.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya kebersihan kantor	Bulan	12	2.800.000	
	4 Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Temanggung	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	11.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Temanggung	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	8.000.000	
	5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang memadai	Bulan	12	8.500.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang memadai	Bulan	12	6.500.000	

	6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Temanggung	Tersedianya komponen instalasi kantor	Bulan	12	3.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Temanggung	Tersedianya komponen instalasi kantor	Bulan	12	2.400.000	
	7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	4.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	3.200.000	
	8	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Temanggung	Tersedianya makanan dan minuman	Bulan	12	37.500.000	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Temanggung	Tersedianya makanan dan minuman	Bulan	12	30.000.000	
	9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Temanggung	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulan	12	70.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Temanggung	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulan	12	60.000.000	
	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten Temanggung	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan	12	6.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten Temanggung	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan	12	4.500.000	
	11	Jasa pelayanan perkantoran	Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya kesejahteraan pegawai	Bulan	12	50.000.000	Jasa pelayanan perkantoran	Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya kesejahteraan pegawai	Bulan	12	40.000.000	
F.		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur						Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur						
	1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kabupaten Temanggung	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Jenis Barang	5	25.000.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kabupaten Temanggung	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Jenis Barang	5	20.000.000	
	2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya gedung kantor	Unit gedung	1	30.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya gedung kantor	Unit gedung	1	24.000.000	
	3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	9.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	7.000.000	

	4						Pembangunan Gedung Kantor	Kabupaten Temanggung	Terbangunnya gedung kantor Satpol PP	Unit	1	12.000.000.000		
G.	Program Peningkatan disiplin aparatur						Program Peningkatan disiplin aparatur							
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kabupaten Temanggung	Meningkatnya disiplin aparatur	Orang	50	70.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kabupaten Temanggung	Meningkatnya disiplin aparatur	Orang	50	56.000.000	
H.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah						Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah							
	1	Pengamanan dan Pengawasan	Kabupaten Temanggung	Terselenggaranya pengamanan dan pengawasan protololer	Kecamatan	20	60.000.000	Pengamanan dan Pengawasan	Kabupaten Temanggung	Terselenggaranya pengamanan dan pengawasan protololer	Kecamatan	20	48.000.000	
I.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
	1	Pembinaan dan pengembangan Satpol PP	Kabupaten Temanggung	Meningkatnya disiplin dan kualitas Satpol PP	Orang	45	70.000.000	Pembinaan dan pengembangan Satpol PP	Kabupaten Temanggung	Meningkatnya disiplin dan kualitas Satpol PP	Orang	45	56.000.000	
	2	Pendidikan dan pelatihan Satpol PP	Kabupaten Temanggung	Meningkatnya disiplin dan kualitas Satpol PP	Orang	1	50.000.000	Pendidikan dan pelatihan Satpol PP	Kabupaten Temanggung	Meningkatnya disiplin dan kualitas Satpol PP	Orang	1	40.000.000	
	3						Fasilitasi kegiatan Peningkatan SDM Satpol PP	Kabupaten Temanggung	Terselenggaranya apel siaga dalam rangka HUT satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Orang	50	48.000.000		
	4						Penguatan Kelembagaan Satpol PP	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya penguatan kelembagaan Satpol PP sesuai ketentuan yang berlaku	Kegiatan	4	32.000.000		

J.	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan						Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan						
1	Pemberantasan barang kena cukai ilegal (DBHCHT)	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pemberantasan barang kena cukai ilegal	Lokasi	18	120.000.000	Pemberantasan barang kena cukai ilegal (DBHCHT)	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pemberantasan barang kena cukai ilegal	Lokasi	18	200.000.000	
	JUMLAH INDIKASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG					1.574.750.000	JUMLAH INDIKASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG					13.779.700.000	

Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017.

2.5. Penelaahan program dan kegiatan usulan masyarakat

Berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan, ada beberapa program dan kegiatan yang diusulkan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun usulan dari beberapa peserta Musrenbang Kecamatan tersebut adalah :

1. Kecamatan Kranggan

Kegiatan yang diusulkan adalah : Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah Masyarakat Desa yang meliputi Desa Gentan dan Desa Purwosari.

2. Kecamatan Kandangan

Kegiatan yang diusulkan berupa : Pengadaan Seragam Linmas Desa Malebo, Desa Caruban, dan Desa Wadas.

Dari usulan tersebut, perlu ditelaah apakah perlu dimasukkan dalam program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja atau usulan tersebut merupakan menjadi program dan kegiatan dari SKPD lain. Berdasarkan telaah yang dilakukan, rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, dapat kami sajikan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung Tahun 2017

No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Program : Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kegiatan : Koordinasi Keamanan Daerah	Desa Gentan dan Desa Purwosari Kecamatan Kraanggan	Terlaksananya Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah Masyarakat Desa	1 paket / desa	Diusulkan dari Kecamatan Kraanggan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2017

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program - program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung adalah :

1. mendiskripsikan tentang program - program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung;
2. program - program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas;
3. dijadikan sebagai acuan perencanaan di tahun berikutnya.

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP pada tahun 2017 yang sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Satpol PP adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan
2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
 - a. Penertiban pedagang kaki lima
 - b. Penegakan Perda dan Yustisi
 - c. Penertiban pelajar
 - d. Patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
 - e. Koordinasi Keamanan Daerah
 - f. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
 - g. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a. Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung

4. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
 - a. Pembinaan satuan linmas
 - b. Diklat SAR anggota linmas
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - d. Penyediaan alat tulis kantor
 - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - h. Penyediaan makanan dan minuman
 - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 - k. Jasa pelayanan perkantoran
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
7. Program Peningkatan disiplin aparatur
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
8. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
 - a. Pengamanan dan Pengawasan
9. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Satpol PP
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Satpol PP
10. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 - a. Pemberantasan barang kena cukai ilegal (DBHCHT)

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP pada tahun 2017 yang diluar dokumen Rencana Strategis Satpol PP adalah sebagai berikut :

1. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
 - a. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2. Program pengembangan wawasan kebangsaan
 - a. Pengadaan Alat Korps Musik
3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
 - a. Pembinaan dan Pelantikan Anggota Satlinmas se Kabupaten Temanggung
4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - a. Pembangunan Gedung Kantor
5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - a. Fasilitasi kegiatan Peningkatan SDM Satpol PP
 - b. Penguatan Kelembagaan Satpol PP

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Temanggung adalah Program Tahunan Satpol PP Kabupaten Temanggung yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Satpol PP Kabupaten Temanggung. Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Temanggung selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Satpol PP Temanggung.

Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Satpol PP Kabupaten Temanggung. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Satpol PP Kabupaten Temanggung sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat Satpol PP Kabupaten Temanggung selama kurun waktu Satu tahun. Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja, disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek kabupaten Temanggung juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satpol PP Tahun 2017. Adapun fungsi dari Renja tahun 2017 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja selama tahun 2014 bagi Satpol PP, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Demikian Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2017 kami susun secara obyektif, sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

Temanggung, 1 Juni 2016
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. SATRIA ENDRA BASUKI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19611110 198503 1 018